

ANALISA DINAMIKA KERJASAMA KOTA MEDAN-GWANGJU DALAM KERANGKA SISTER CITY PADA TAHUN 2017-2021

Oleh : Rifqi Mulya Nauli Siregar

email: rifqi.mulya0065@student.unri.ac.id

Pembimbing : Saiman Pakpahan S.IP, M.Si

Bibliografi : 6 Buku, 9 Dokumen, 16 Jurnal, 17 Website, 15 Media Online

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the Dynamics of Medan-Gwangju City Cooperation within the Sister City Framework in the 2017-2021 period. The Medan City Government has carried out this collaboration since the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) in 1997. International cooperation which generally involves a state has been transformed in terms of actors so that it involves sub-state actors as actors in international relations, this is included in the phenomenon of paradiplomacy as an effort advancing regional potential in accordance with the mandate of regional autonomy policy. In the long course of cooperation involving the two sub-state or regional government actors, of course there are dynamics in the relationship and problems that occur in the cooperative relationship.

This research was using qualitatively descriptive using several methods in data collection, including interviews, observations, and literature studies from books, journals, websites, and documents related to this collaboration. This study uses the perspective of liberalism and paradiplomacy theory.

The results of this paper show how in accordance with the theory of paradiplomacy, the Medan City Government seeks to maximize the potential of the area contained in the City of Medan. However, in an effort to maximize the potential of the area which is manifested in the form of cooperation within the sister city framework, there are dynamics that occur during a cooperative relationship as well as problems and potential for cooperation that have not been optimized and then this paper can be used as material for consideration of City Government policy making. Medan in carrying out international cooperation as a sub-state actor.

Keywords: Dynamics, Sister City, Paradiplomacy, Local Government, Medan City, Gwangju City, Momerandum of Understanding.

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi membuat Hubungan Internasional mengalami transformasi mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional. Saat ini, aktor non-negara diberikan otoritas baru yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam unit analisis negara, tidak ada lagi keterbatasan terkait otoritas dalam membuat kerjasama luar negeri, baik untuk pemerintah daerah maupun pusat. Kepentingan nasional secara spesifik pada setiap daerah dalam suatu negara berbeda-beda dan tidak dapat dipenuhi secara independen sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan umum menjadi tujuan utama dalam membangun kerjasama ini. Rasionalisasi tersebut membuat pemerintah daerah mendapat sebagian wewenang untuk menjalin kerjasama internasional oleh pemerintah pusat sebagai aktor sub-negara yang melakukan kerjasama internasional dan aktivitas diplomasi karena adanya globalisasi¹. Kebudayaan dan Hubungan Internasional digabungkan oleh globalisasi dalam beberapa level, diantaranya sosial, politik, dan ekonomi². Namun dalam pelaksanaannya, kepentingan nasional harus diperjuangkan dalam bentuk sinkronisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam bentuk laporan inisiasi bentuk kerjasama internasional.

Peran negara lain sangat besar dalam upaya berdirinya suatu negara. Bahkan, pengakuan dari negara lain menjadi standar dalam berdirinya suatu negara. Munculnya pemerintahan daerah sebagai pelaksana interaksi internasional disebabkan oleh berubahnya paradigma dalam hubungan internasional dampak dari

modernisasi dalam globalisasi yang mengikis batas batas negara antara satu dengan yang lainnya namun tetap mengedepankan prinsip integrasi, dalam artian ini disebut juga dengan paradiplomasi. *Sister City* adalah varian kerangka kerjasama internasional yang unik karena aktor yang terlibat cenderung berbeda dengan yang terjadi pada umumnya, yaitu antara pemerintah daerah dalam suatu negara dengan pemerintah daerah yang lain di setiap negara yang mencakup kota maupun provinsi. Pemerintah daerah mendapat otoritas dalam menjadi aktor sub-nasional dan melakukan interaksi internasional dengan berbagai pihak yang strategis baik dengan institusi negara maupun swasta, nasional maupun internasional dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam upaya memajukan daerah sesuai amanat dari otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Hal ini memunculkan suatu peluang bagi pelaku hubungan luar negeri dengan adanya kedua landasan hukum tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah daerah.³

Dasar hukum pelaksanaan *Sister City* Kota Medan diantaranya; UUD 1945, UU No.1 Tahun 1982 tentang pengesahan konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permenluri No 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan dan Kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah, Permendagri No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama

¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013).

² Lianna Amirkhanyan, *Globalization and International Relation* (Armenia, 2011), <https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?participants-papers-icd-annual-conference-december-2012>.

³ Kementerian Luar Negeri, "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah" (Jakarta, 2006).

Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, Permendagri No. 15 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri No. 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.⁴

Sister City diproyeksikan sebagai upaya melaksanakan pembangunan daerah. Situasi dimana kedua daerah yang menjalankan kerjasama berasal dari negara yang berbeda secara geografis, ketatanegaraan, dan kebijakan politik menjadi alasan kuat untuk menjalankan kerjasama ini untuk mendorong interaksi sosial masyarakat dan budaya kedua negara. Proyeksi pembangunan daerah merupakan hal yang dipandang strategis untuk mengoptimalisasi kebijakan otonomi daerah. Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Gwangju di Korea Selatan dengan Pemerintah Kota Medan di Indonesia yang merupakan salah satu kerjasama *sister city* yang berjalan dengan baik dan progresif hingga hari ini.

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) pada tahun 1997 menandai awal dimula hubungan antar kedua kota. Sebelum penandatanganan MoU, rangkaian proses peresmian kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) yaitu sebuah surat pernyataan untuk membuat atau membangun MoU. Hubungan ini mencapai tingkat yang sangat ditandai dengan pembubuhan nama Kota Gwangju menjadi jalan di kawasan penting dan bersejarah di kota Medan, yaitu kawasan Kesawan. Pertukaran pelajar dari Kota Medan dan Kota Gwangju sejak 1999 juga membawa hubungan kedua kota menjadi lebih baik.⁵ Rangkaian pertukaran pelajar

ini umumnya akan disambut di rumah dinas Wali Kota Medan. Penyambutan tersebut dibarengi dengan pengenalan kuliner khas Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Selain itu, terdapat rangkaian pengenalan pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara, seperti *Caldera and Lake Toba Heritage*. Selanjutnya, kunjungan balik dilakukan pelajar dari Kota Medan ke Gwangju, Korea Selatan dengan jamuan jamuan berupa destinasi wisata, kuliner, dan budaya yang menunjukkan adanya pertukaran budaya dalam program tersebut. Kerjasama kedua kota tersebut didasari oleh potensi yang dimiliki di sektor pendidikan dan kebudayaan yang dibentuk dengan prinsip prinsip mutualis dan kolaborasi melalui model kerangka kerjasama *sister city*.

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme, yang mana perspektif ini memandang bahwa dalam sistem hubungan internasional tidak semata-mata hanya aktor negara (*State Actor*) yang berperan, tetapi aktor non-negara (*Non- State Actor*) juga mempunyai peranan yang sama dalam melakukan interaksi internasional Adapun dalam hal ini aktor non-negara dapat membangun sistem internasional yang baru. Asumsi dasar kelompok liberal dalam segi keamanan adalah konflik dapat diatasi dan perdamaian dapat dicapai melalui kerja sama internasional. Kelompok liberalis percaya bahwa integrasi antar negara, wilayah, dan kawasan merupakan puncak dari memaknai arti perdamaian. Ketika sebuah kerjasama terjalin antar sebuah negara dengan negara lain maupun kawasan, kemungkinan terjadinya konflik yang memiliki probabilitas terjadi eskalasi menjadi perang semakin kecil. Maka, perjanjian internasional secara umum dapat menjadi jaminan keamanan sebuah negara yang terlibat didalamnya.

Varian perspektif liberalisme yang digunakan dan relevan dengan penelitian

⁴ Daerah dan Lembaga Setda Kota Medan
Pemerintah Kota Medan, Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, "Kerjasama Kota Bersaudara Kota Medan" (Medan, 2018).

⁵ Waspada.co.id, "Majalah Korea Soroti Hubungan Sister City Medan Dan Gwangju," *Waspada.Co.Id*, last modified 2019, accessed November 22, 2020, <https://waspada.co.id/2019/02/majalah-korea-soroti-hubungan-sister-city-medan-dan-gwangju/>.

ini adalah *sociological liberalism*, kelompok ini membahas bagaimana signifikansi aktor non-negara dalam sistem internasional. Kelompok ini juga menghadirkan beberapa konsep atau teori, dan yang relevan dengan penelitian ini adalah *transnational interaction*. Interaksi global atau perpindahan uang, orang, jasa, barang, yang melintasi batas negara dilakukan bukan hanya oleh negara tetapi juga “aktor non-negara—individual atau organisasi”. Interaksi yang melibatkan beragam aktor ini disebut sebagai interaksi transnasional. Aktor negara dan non-negara berkontribusi atas dari interaksi global yang berlangsung secara bersamaan. Interaksi global tersebut dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: 1) komunikasi, perpindahan informasi termasuk kepercayaan, ideologi, ide, doktrin, dan hal hal lain yang berasal dari negara lain dan belum ada dalam sebuah negara; 2) transportasi, perpindahan obyek fisik, termasuk material perang dan properti pribadi dari seorang warga negara ke negara lain; 3) keuangan, perpindahan uang dan instrumen kredit, aktivitas bisnis dan transaksi yang bersifat internasional; 4) perjalanan (travel), perpindahan orang, pariwisata, serta akulturasi nilai nilai budaya yang mungkin terjadi dalam sebuah perjalanan.⁶

Hubungan internasional juga meliputi hubungan transnasional tidak lagi seputar hubungan antar negara yang melibatkan aktor non negara berupa individu dan kelompok yang berasal dari berbagai negara. Dapat dilihat bahwa terjadi transfigurasi pada aktor yang melakukan interaksi dalam hubungan internasional, dibuktikan dengan kehadiran aktor selain negara. Pemerintah daerah maupun individu yang melakukan interaksi internasional dalam hal ini disebut dengan aktor sub-negara. Selain

itu, perdamaian dan resolusi konflik juga bukan menjadi aspek yang terus menerus dibicarakan, sektor sektor seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan hal lainnya juga menjadi substansi baru dari sebuah kerjasama internasional.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada pihak pihak yang menjalankan praktik diplomasi. Sejak 1960, praktik diplomasi tidak lagi hanya di representasikan oleh perwakilan resminya, melainkan menjadi luas dengan adanya aktor aktor lain.⁷ Pada UU Pasal 37 tahun 1999 dalam kebijakan pemerintahan Republik Indonesia disebutkan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang menjadi aktor hubungan internasional, melainkan juga pemerintah daerah, lembaga negara, perusahaan, partai politik, komunitas masyarakat, maupun individu warga negara. Oleh karena itu, kepentingan yang berbeda beda mempengaruhi transformasi dari tujuan diplomasi.

Teori Paradiplomasi

Dalam penelitian diperlukan pemaparan jelas tentang konsep-konsep yang akan digunakan. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritis yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah teori paradiplomasi. Paradiplomasi adalah fenomena global yang dimanfaatkan pemerintah kota sebagai instrumen untuk berintegrasi dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah di negara lain untuk meraih kepentingan masing masing kota. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh terjadinya globalisasi dimana batas batas antar negara semakin samar dan dapat terhubung dengan mudah. Globalisasi dalam hal ini membawa pengaruh positif yang menghadirkan fasilitator untuk memajukan daerah

⁶ Joseph S. Nye Jr and Robert O. Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction,” *International Organization* 25, no. 3 (1971): 329–349.

⁷ Poros Ilmu, “Memahami Konsep Paradiplomasi Dalam Hubungan Internasional,” *Poros Ilmu*, last modified 2015, accessed November 24, 2020, <https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>.

dengan intrik identitas daerah didalamnya. Paradiplomasi disebabkan oleh globalisasi yang mendorong pergeseran dari makroregionalisme menjadi bentuk mikro-regionalisme.⁸

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aktor sub-negara yang menjalankan hubungan internasional, aktivitas paradiplomasi ini sangat masif dan berkembang dengan cepat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi interaksi negara dalam sistem internasional. Fenomena munculnya paradiplomasi semakin masuk akal dimana dapat ditemui anomali dimana sebuah sub-negara contohnya; New York, Amerika Serikat memiliki pendapatan per kapita (*Gross Domestic Product*) lebih tinggi dari sebuah negara seperti Korea Selatan atau Sao Paulo, Brazil yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari daripada seluruh negara di Amerika Utara⁹. Duchacek menyebutkan bahwasanya paradiplomasi terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya *transborder paradiplomacy*, *transregional paradiplomacy*, *global paradiplomacy*.¹⁰ Kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Medan-Gwangju dikategorikan sebagai *global paradiplomacy* dimana pemerintah daerah sebagai aktor sub-nasional melaksanakan praktik diplomasi dengan pemerintah daerah lainnya dari negara yang berbeda, tidak berbatasan, serta tidak dalam satu kawasan.

Berdasarkan pembahasan dalam paradiplomasi, membagi dua tipe

paradiplomasi secara fungsional yaitu *global paradiplomacy* dan *regional paradiplomacy*.¹¹ Kerjasama Kota Medan dengan Kota Gwangju dikategorikan sebagai bentuk *global paradiplomacy* dimana yang terlibat adalah satuan politik tingkat rendah dan wilayahnya tidak berbatasan secara langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu studi analisis dengan asumsi epidemiologi tentang tujuan atau fungsi; memahami fenomena sosial (menjelaskan penyebab), membantu pembaca untuk memahami semua situasi melalui pendekatan "etnografi", *thick description*, yaitu peneliti menjadi lebih terhubung dengan penelitiannya.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, untuk menemukan unsur, dan ciri-ciri dalam menggambarkan sebuah fenomena melalui sebuah analisis dengan mengumpulkan data lalu menginterpretasikan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kerjasama *Sister City* Kota Medan-Gwangju

Dalam membangun sebuah kerjasama antarnegara maupun antar *sub* negara, tentu terdapat dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Dalam sistem internasional, perubahan dapat terjadi akibat fenomena globalisasi yang menghadirkan aktor aktor baru termasuk Pemerintah Kota sebagai aktor internasional. Selain itu, isu-isu yang dibahas ikut bertransformasi dari isu tradisional menjadi non-tradisional. Kerjasama *Sister City* ini merupakan bentuk transformasi dan perkembangan yang terjadi akibat dari globalisasi sehingga masuk kedalam kategori paradiplomasi. Pada tahap pengesahan kerjasama ini, tentu sudah banyak dinamika yang sudah terjadi pada tahapan

⁸ Miguel Santos Neves, "Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of 'Soft Power,'" *e-journal Of International Relations* 1, no. 1 (2010): 10–28, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044925&info=resumen&idioma=POR>.

⁹ Jorge Schiavon, *Comparative Paradiplomacy*, 1st ed. (London: Routledge, 2018).

¹⁰ Francisco Aldecoa and Michael Keating, eds., *Paradiplomacy in Action : The Foreign Relations of Subnational Governments* (London and Oregon: Frank Cass Publishers, 1999).

¹¹ Ibid.

pembentukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan informasi dari narasumber wawancara, mekanisme tersebut yaitu:

Awalnya ada negoisasi antar dua pihak, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan LoI (*Letter of Intent*) yang kemudian dilanjutkan pada tahapan pembuatan MoU. Dalam tahapan ini juga terdapat tahapan lain seperti melapor ke DPR, Pemerintah Provinsi, AKLN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Februari 2023)¹²

Mekanisme yang cukup panjang ini tentu sudah menjadi dinamika tersendiri bagi Pemerintah Kota Medan. Sejak MoU ditandatangani pada 1997 dimana terdapat frasa; *bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak*, membuka peluang agar kerjasama ini terus bertransformasi. Namun, justru dalam pelaksanaan kerjasama ini masih ada bidang bidang yang belum berjalan dengan optimal seperti bidang teknologi sehingga menjadi pertimbangan perluasan bidang kerjasama yang sebenarnya potensial. Selain itu, tentu diantara Kota Medan dan Kota Gwangju memiliki perbedaan yang tampak dari banyak aspek, namun Pemerintah Kota Medan memandang bahwa:

“Perbedaan yang dapat dilihat dari keteraturan masyarakat, disiplin, kebersihan, dan kepatuhan terhadap hukum serta banyak hal lainnya yang menempatkan Kota Gwangju lebih unggul. Selain itu ada juga perbedaan iklim, ekonomi dan industri, serta budaya yang dipengaruhi latar belakang historis yang berbeda. Dan dalam hal ini Kota Medan memandang perbedaan ini sebagai

keuntungan agar dapat belajar dari nilai nilai positif. Dan dalam menjalin kerjasama, pemerintah kota medan memandang lebih banyak aspek positif dari Kota Gwangju”.¹³

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Namun, tentu Pemerintah Kota Medan tentu dapat melihat sebuah persamaan yang dapat menjadi alasan penentuan keputusan untuk bekerjasama dengan Kota Gwangju. Pemerintah Kota Medan memandang bahwa:

“Kita perlu tegaskan bahwa persamaan ini tidak bisa identik. Namun jika dilihat dari tingkat kota, Kota Gwangju dan Kota Medan berada pada tingkat yang hampir sama secara Geografis. Kota Gwangju merupakan kota nomor 5 terbesar di Korea Selatan sehingga tipe pembangunannya hampir sama dengan Kota Medan yang juga bukan kota terbesar di Indonesia sehingga kedua kota ini cukup *apple to apple* untuk dikomparasi. Dari faktor ekonomi memang Gwangju lebih maju karena industry yang besar di sana. Namun kedepannya jika memungkinkan Pemerintah Kota Medan saling bertukar pengalaman untuk memajukan ekonomi. Dalam bidang sosial, rakyat Kota Gwangju sangat ramah sehingga program pertukaran pelajar menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Kota Gwangju sangat ingin datang ke Medan dan sebaliknya juga sangat ramah menyambut delegasi Kota Medan di Gwangju dan tentu faktor ini menjadi pertimbangan dalam penentuan membuat kerjasama”.¹⁴

¹² Rifqi Mulya Nauli Siregar, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pemerintah Kota Medan*.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Berdasarkan informasi yang didapatkan, perbedaan antara Kota Medan dan Kota Gwangju dapat menjadi dinamika umum dalam perjanjian ini. Kendati demikian, Pemerintah Kota Medan berhasil melihat peluang yang menguntungkan bagi Kota Medan untuk bekerjasama bahkan hingga bertahan lama hingga lebih dari 30 tahun. Berdasarkan informasi dari narasumber wawancara, hal ini disebabkan:

“Kesamaan pandang, persahabatan yang dibina dengan baik sehingga kerjasama masih bisa berjalan didukung dengan pola komunikasi yang baik antar pemerintah, antar perseorangan, maupun dari komunikasi delegasi *student exchange* yang menjadi faktor keawetan kerjasama ini. Meskipun perbedaan ada, tapi kita mencari persamaan yang lebih banyak”.¹⁵

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Djauzi, kerjasama ini dapat terus berjalan meskipun dengan adanya perbedaan, namun kepentingan kemajuan dari Kota Medan harus menjadi prioritas tujuan kerjasama ini.

Dinamika yang terjadi dalam kerjasama *sister city* ini pada tahun 2017-2021 adalah terhambatnya program kegiatan yang telah terlaksana sejak awal pembentukan kerjasama namun harus berubah imbas dari adanya pandemic COVID-19. Pernyataan ini didukung oleh informasi yang diberikan narasumber wawancara, yaitu:

“Dinamika yang terjadi diantara tahun 2017 hingga 2021 yang dapat dilihat adalah pada tahun 2020 sampai 2021 dikarenakan COVID-19 sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung. Kemudian pihak Kota Gwangju berinisiatif untuk menggantikan kegiatan dalam bentuk online (zoom meeting) dalam bidang budaya untuk tetap menjaga persahabatan antar kedua kota dan memastikan kerjasama *sister city* tetap berlangsung”.¹⁶

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Pandemi COVID-19 mengharuskan kegiatan pertukaran pelajar yang sudah dilakukan sejak tahun 2000 harus berganti bentuknya menjadi kegiatan online. Hal ini tentu berdampak karena materi atau substansi kegiatan menjadi terbatas dalam bidang-bidang tertentu misalnya kunjungan ke instansi kebudayaan, pendidikan, maupun teknologi menjadi tidak optimal. Namun, dengan komunikasi yang intensif antar kedua pemerintahan hal ini tidak mempengaruhi hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Gwangju. Harus diakui, bahwa persahabatan diantara kedua kota ini mampu menyamakan persepsi tentang bagaimana kerjasama ini tetap berjalan meskipun sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada akhirnya, pertukaran pelajar sudah dapat dilakukan secara langsung pada bulan November tahun 2022 dimana delegasi pertukaran pelajar dari Pemerintah Kota Medan mengunjungi Kota Gwangju terlebih dahulu dan disusul dengan kunjungan delegasi Kota Gwangju pada bulan Februari tahun 2023 ke Kota Medan.

Dalam memahami dinamika kerjasama dalam kerangka *sister city* ini,

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

penulis dapat melihat variabel baru yang berperan sebagai sumber dinamika sebuah hubungan kerjasama, yaitu pandemi COVID-19. Namun, langkah antisipasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Gwangju dapat diapresiasi sebagai upaya untuk mempertahankan serta merawat kerjasama ini sehingga tidak menjadi kendala dalam hubungan kerjasama. Selain itu, penulis juga dapat mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang terdampak imbas dari pandemi COVID-19, diantaranya:

Bidang Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang terbangun dalam kerjasama *sister city* ini dapat dikategorikan terhambat imbas dari pandemic COVID-19. Selain tidak dapat berjalannya kegiatan-kegiatan investasi maupun kegiatan ekonomi mikro masing-masing pemerintah juga tidak bisa menerima manfaat ekonomi dari kunjungan delegasi antar kedua pemerintah kota. Manfaat ekonomi yang umumnya didapat dari kunjungan antardelegasi yaitu kegiatan ekonomi di sektor pariwisata ketika masing-masing delegasi berkunjung dalam program pertukaran pelajar

Bidang Kebudayaan

Aktivitas kebudayaan yang terbangun dalam kerjasama *sister city* ini dapat dikategorikan terhambat / tidak optimal imbas dari pandemic COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan kunjungan kebudayaan dalam program pertukaran pelajar antardelegasi. Ketidadaan kunjungan ini tentu mempengaruhi nilai pertukaran budaya yang terjadi. Selain itu, selama masa COVID-19 masing-masing pemerintah kota dialihkan fokusnya pada upaya penanganan COVID-19 sehingga tidak bisa melaksanakan pameran yang mengundang tim-tim kesenian untuk melakukan kerjasama dalam bidang kebudayaan. Namun, kegiatan berbasis *online* yang dilakukan saat masa pandemi

COVID-19 mengusung tema kebudayaan sehingga dapat dilihat upaya dari masing-masing pemerintahan untuk tetap melaksanakan kegiatan di bidang kebudayaan meskipun tidak optimal.

Bidang Pendidikan

Aktivitas pendidikan yang terbangun dalam kerjasama *sister city* ini dapat dikategorikan terhambat imbas dari pandemic COVID-19. Hal ini dapat dilihat juga dari ketiadaan kunjungan antardelegasi dalam bidang pendidikan. Tentunya dalam mempelajari kultur pendidikan di masing-masing kota diperlukan adanya kunjungan agar dapat mengobservasi fasilitas pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan tentu saja program pertukaran pelajar yang dilakukan kedua belah pihak merupakan program yang terhambat di bidang pendidikan.

Bidang Teknologi

Kendati kerjasama di bidang teknologi belum dapat berjalan dengan baik dan optimal bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19, upaya-upaya yang dilakukan untuk mempelajari teknologi dari Korea Selatan yang dikemas dalam bentuk kunjungan pertukaran pelajar dan delegasi Pemerintah Kota Medan menjadi terhambat imbas dari pandemi tersebut.

Hambatan Kerjasama Sister City Kota Medan-Gwangju

Selain dinamika yang terjadi dalam hubungan kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Gwangju dalam kurun waktu 2017-2021, berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan kendala yang dirasakan secara keseluruhan sejak dibangunnya kerjasama *sister city* ini. Kendala yang dapat diidentifikasi adalah perbedaan karakteristik kepemimpinan Wali Kota Medan selaku pemimpin yang menentukan arah dan komitmen Pemerintah Kota Medan.

Setiap pemimpin di Kota Medan memiliki *political will* yang berbeda-beda dalam upaya mendukung dan mengembangkan kerjasama *sister city* ini. Perbedaan perbedaan tersebut diantaranya:

“Secara faktual, di masa kepemimpinan Pak Abdillah (2000-2008) sangat mendukung dan berperan besar dalam memajukan kerjasama ini. Ini terlihat dari kunjungan kedua belah pihak yang sangat intens, beliau juga memiliki *political will* yang besar. Hal ini juga dibuktikan dengan investasi Royal Sumatera yang terjadi di masa Pak Abdillah. Selanjutnya di masa Pak Rahudman (2009-2013) tidak terlalu besar kegiatan di bidang ini. Namun beliau tetap mendorong dan tidak pernah memiliki keinginan untuk menghentikannya. Tapi antara mendukung dan mengembangkan ini kan berbeda, sehingga secara *political will* Bapak Abdillah memiliki *political will* yang lebih besar daripada Bapak Rahudman. Kemudian di masa kepemimpinan Pak Dzulmi Eldin (2013-2019) secara komunikasi tidak ada masalah, terbukti dengan adanya kunjungan antar Walikota Kota Medan dan Walikota Kota Gwangju. Namun, pengembangan yang kita harapkan belum optimal karena masih ada bidang kerjasama yang belum kita sentuh. Kemudian di masa Pak Bobby (2021-sekarang) belum begitu banyak manfaat kegiatan dari kerjasama ini yang menguntungkan bagi Kota Medan. Kita harapkan Pak Walikota kita sekarang mendapat informasi yang lebih banyak dan mengembangkan kerjasama demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Medan”.¹⁷

(Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilimi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Berdasarkan informasi diatas, dapat dipahami bahwasanya *political will* dari pemimpin di Kota Medan mempengaruhi

efektivitas dari kerjasama ini. Menurut Craig Charney *political will* adalah:

“To advocates, politicians, and organizations promoting change, “political will” is the holy grail. When advocates argue, politicians vote, and organizations campaign, they say they are trying to shape or respond to political will. Political will is the ghost in the machine of politics, the motive force that generates political action”.¹⁸

Selain itu, *political will* juga dapat diukur melalui indikator, menurut Derick (1999), indikator yang bisa digunakan untuk mengukur *political will* pemerintah adalah; inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha/kerjasama.¹⁹ Dalam hal ini, *political will* seorang pemimpin/Wali Kota di Kota Medan tentu berperan besar dalam memajukan dan mengembangkan kerjasama *sister city* dengan cara mengoptimalkan bidang-bidang kerjasama yang sudah disepakati pada MoU. Kemudian, bidang-bidang kerjasama ini tentu saja dapat diperjuangkan untuk kemajuan Kota Medan dari segi pembangunan, pendidikan, sosial-politik, dan lain lain.

Peluang Kerjasama *Sister City* Kota Medan-Gwangju

Peluang kerjasama dalam *sister city* antara Kota Medan dan Kota Gwangju dapat dilihat dari beberapa bidang yang belum optimal dan melihat pada bidang-bidang yang berkembang dalam sistem internasional. Peluang yang dapat dilihat adalah peluang untuk mengoptimalkan kerjasama di bidang teknologi

¹⁸ Craig Charney, “Political Will: What Is It? How Is It Measured?,” *Charney Research Group*, last modified 2009, <https://www.charneyresearch.com/resources/political-will-what-is-it-how-is-it-measured/>.

¹⁹ Derick W. Brinkerhoff, “State-Civil Society Networks For Policy Implementation In Developing Countries 1,” *Review of Policy Research* 16, no. 1 (1999): 123–147.

¹⁷ Ibid.

sebagaimana disepakati dalam MoU *Sister City* antara Pemerintah Kota Medan dan Kota Gwangju. Bidang bidang teknologi yang dapat disepakati misalnya terkait teknologi industri, teknologi tata ruang, penegakan hukum, serta lingkungan.

Dalam wawancara dengan narasumber yang sudah terlibat sejak dari awal pembentukan kerjasama ini, terdapat harapan yang besar pada kerjasama ini, yaitu:

“Harapannya adalah setidaknya bidang bidang kerjasama yang sudah disepakati sejak 1997 itu dicoba dikembangkan/dioptimalisasi seperti halnya perjanjian di bidang teknologi yang belum maksimal. Sebenarnya pihak Kota Medan sudah beberapa kali mengunjungi Gwangju untuk mempelajari pengolahan sampah yang bisa dikonversi menjadi energi listrik, mereka berhasil dan bersih di Gwangju. Pihak Gwangju juga sudah pernah ke Kota Medan khusus untuk menjajaki kerjasama di bagian pengolahan sampah untuk dijadikan energi listrik. Namun, saya tidak tahu mengapa sampai sekarang belum bisa diterapkan teknologi pengolahan sampah di Kota Medan. Kita juga berharap kedepannya pemimpin di Kota Medan ini memiliki political will yang besar untuk mendukung dan mengembangkan kerjasama ini”.²⁰ (Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Iلمي, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

Berdasarkan informasi dari Bapak Djauzi, melihat adanya kunjungan tersebut tentu dapat dilihat sebenarnya ada upaya untuk mengoptimalkan, namun realisasi dalam bentuk kerjasama maupun program belum dapat dilihat hingga sekarang. Kerjasama dalam bidang teknologi untuk mengolah sampah dan mengkonversinya menjadi energi listrik juga merupakan hal yang strategis untuk pembangunan Kota Medan dan kenyamanan masyarakat Kota

Medan dimana masalah sampah merupakan masalah yang umum terjadi pada kota-kota metropolitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan Dinamika Kerjasama Kota Medan-Kota Gwangju Dalam Kerangka *Sister City*, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan Kota Gwangju berbasis kota bersaudara atau *sister city* dimana kerjasama ini selain memandang hal hal yang strategis dalam tujuan kerjasama tentu juga mengedepankan prinsip-prinsip persaudaraan yang dibangun sejak 1997 terhitung dengan ditandatanganinya *Momendum of Understanding* (MoU). Proses pengembangan kerjasama hingga menjadi sebuah MoU dimulai dengan dikirimnya *Letter of Intent* (LoI) dan ditindaklanjuti dengan pelengkapan administrasi negara untuk memberikan hak Pemerintah Kota bekerjasama secara internasional dengan Pemerintah Kota di negara lain. Mekanisme melibatkan banyak pihak diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.
2. Berdasarkan MoU, bidang bidang yang disepakati kedua belah pihak Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Gwangju yaitu; bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang sudah terjadi adalah pembangunan *Royal Sumatera* sebagai bentuk investasi yang melibatkan pihak ketiga, yaitu pebisnis yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Gwangju. Namun, dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebaliknya belum pernah

²⁰ Rifqi Mulya Nauli Siregar, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pemerintah Kota Medan*.

berinvestasi kembali di Kota Gwangju. Selain itu, kegiatan ekonomi lainnya adalah kegiatan *Gwangju Expo* yang melibatkan usaha-usaha mikro. Dalam bidang pendidikan, kerjasama yang disepakati diwujudkan dalam bentuk pertukaran pelajar untuk mempelajari bagaimana kultur pendidikan di Korea Selatan terkhusus di Kota Gwangju. Program ini juga dilaksanakan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan teknologi di Kota Gwangju. Dalam bidang kebudayaan, kerjasama yang disepakati diwujudkan dalam bentuk pameran kesenian dalam acara bergengsi di masing-masing kota dengan tajuk undangan kehormatan. Selain itu, unsur budaya juga dipenuhi dalam kegiatan pengenalan dan pertukaran budaya yang terjadi dalam program pertukaran pelajar. Dalam bidang teknologi, kerjasama ini belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Sejak dikirimnya delegasi pada tahun 2000 hingga sekarang belum ada kerjasama dalam bidang teknologi yang komprehensif meskipun sudah ada upaya untuk memaksimalkan. Untuk sementara, kerjasama hanya ada dalam kunjungan delegasi program pertukaran pelajar untuk mengenal teknologi yang notabene lebih maju di Kota Gwangju dalam segi industri maupun lingkungan. Dari keempat bidang tersebut, belum ada bidang-bidang lain yang disepakati meskipun peluang ekspansi bidang kerjasama terbuka dalam MoU.

3. Dinamika yang terjadi dalam masa kerjasama selama 26 tahun adalah bagaimana kerjasama ini belum dapat optimal di setiap pergantian kepemimpinan Wali Kota di Pemerintah Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh faktor *political will* yang berbeda-beda dari masing-masing Wali Kota yang memimpin Kota Medan. Secara spesifik, pada ruang lingkup penelitian (2017-2021)

dinamika yang terjadi adalah berubahnya bentuk kerjasama tepatnya pada program pertukaran pelajar yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2000. Program pertukaran pelajar ini terpaksa diganti bentuknya menjadi berbasis *online* imbas dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara. Perubahan bentuk program ini berdampak pada implementasi kerjasama yang disepakati dalam MoU menjadi kurang maksimal di beberapa bidang. Namun, dalam hal ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip persaudaraan serta komunikasi yang baik sehingga variabel COVID-19 sebagai dinamika kerjasama ini tidak mempengaruhi atau membuat hubungan antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Gwangju menjadi buruk. Meskipun variabel pandemi COVID-19 tidak dapat dimitigasi, langkah antisipasi dari masing-masing pemerintah dapat diapresiasi.

4. Fenomena paradiplomasi dalam studi hubungan internasional dalam hal ini membawa dampak positif untuk kemajuan Pemerintah Kota. Tidak terbatasnya aktor dalam hubungan internasional yang memungkinkan Pemerintah Kota untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan amanat otonomi daerah. Hal ini didukung dengan pernyataan narasumber dalam wawancara, yaitu: “Ini sebenarnya tergantung kepada bagaimana kita menyikapi, kalau kita berpikir positif khususnya pada pembangunan Kota Medan khususnya masyarakat yang dapat menikmati kerjasama ini tentu hal ini sangat positif dan perlu kita jaga serta kembangkan karena dunia sekarang perkembangan tidak bisa ditutup-tutupi dengan perkembangan komunikasi untuk keuntungan kita sendiri. Pada akhirnya, fenomena paradiplomasi ini menguntungkan

bagi Kota Medan dan sekarang tergantung bagaimana memanfaatkannya”.²¹ (Wawancara dengan Bapak Drs. Djauzi Ilmi, SH, MM, Tanggal 10 Maret 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Aldecoa, Francisco, and Michael Keating, eds. *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. London and Oregon: Frank Cass Publishers, 1999.
- Amirkhanyan, Lianna. *Globalization and International Relation*. Armenia, 2011.
<https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?participants-papers-icd-annual-conference-december-2012>.
- Brinkerhoff, Derick W. “State- Civil Society Networks For Policy Implementation In Developing Countries 1.” *Review of Policy Research* 16, no. 1 (1999): 123–147.
- Charney, Craig. “Political Will: What Is It? How Is It Measured?” *Charney Research Group*. Last modified 2009.
<https://www.charneyresearch.com/resources/political-will-what-is-it-how-is-it-measured/>.
- Jr, Joseph S. Nye, and Robert O. Keohane. “Transnational Relations and World Politics: An Introduction.” *International Organization* 25, no. 3 (1971): 329–349.
- Kementerian Luar Negeri. “Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.” Jakarta, 2006.
- Mukti, Takdir Ali. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013.
- Pemerintah Kota Medan, Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah dan Lembaga Setda Kota Medan. “Kerjasama Kota Bersaudara Kota Medan.” Medan, 2018.
- Poros Ilmu. “Memahami Konsep Paradiplomasi Dalam Hubungan Internasional.” *Poros Ilmu*. Last modified 2015. Accessed November 24, 2020.
<https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>.
- Santos Neves, Miguel. “Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of ‘Soft Power.’” *e-journal Of International Relations* 1, no. 1 (2010): 10–28.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044925&info=resumen&idioma=POR>.
- Schiavon, Jorge. *Comparative Paradiplomacy*. 1st ed. London: Routledge, 2018.
- Waspada.co.id. “Majalah Korea Soroti Hubungan Sister City Medan Dan Gwangju.” *Waspada.Co.Id*. Last modified 2019. Accessed November 22, 2020.
<https://waspada.co.id/2019/02/majalah-korea-soroti-hubungan-sister-city-medan-dan-gwangju/>.

²¹ Ibid.